



**PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR *PROPERTY & REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Rijal
022113333

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

MEI 2019

ABSTRAK

Rijal, 022113333, Akuntansi, Akuntansi Perpajakan. Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017. Pembimbing: Bapak Ketut Sunarta dan Bapak Haqi Fadillah.

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum. Di sisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Namun, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Salah satu manajemen pajak yang berkaitan dengan penggunaan hutang adalah adanya beban bunga atas hutang yang termasuk biaya usaha yang dapat menjadi pengurang penghasilan (Pasal 6 (1) UU No. 17 tahun 2000) dan melakukan upaya Manajemen Laba, sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba secara Parsial dan Simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan Sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Verifikatif dengan metode *explanatory survey* dengan alat analisis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal yang di proksikan dengan DER berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang hal ini dikarenakan bunga yang timbul akibat modal yang di dapat dari pihak ke tiga menjadi pengurang bagi laba perusahaan sehingga pajak yang di bayarkanpun akan berkurang, H_1 diterima. Untuk Manajemen Laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang yang berarti manajemen laba tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan namun digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan, elektabilitas perusahaan, kinerja perusahaan maupun yang lainnya, H_2 ditolak. Pengujian secara simultan diperoleh nilai F -hitung $>$ F - tabel atau $5,163 > 3,59$ dengan taraf sig $0,009$ atau $<$ $0,05$ artinya Struktur Modal dan Manajemen Laba secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Maka H_3 diterima.

Kata kunci : Struktur Modal , Manajemen Laba , Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang.

**PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR *PROPERTY & REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR *PROPERTY & REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017**

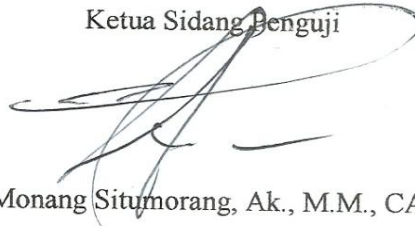
Skripsi

**Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu Tanggal :16 Mei 2019**

**Rijal
022113333**

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



(Monang Situmorang, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak.)

© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Tahun 2019
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulisan dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi seminar dengan judul yang diajukan **“Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan (pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia) periode 2013-2017”**. Skripsi seminar ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi saya
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
4. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M. CA. selaku Ketua Komisi Pembimbing
5. Bapak Haqi Fadillah, SE.,M.AK. selaku Anggota Komisi Pembimbing
6. dosen pengajar, Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
7. Orang tua yang saya cintai, Iman dan Ibu Hindun yang selalu mendoakan dan mendukung saya
8. Sahabat saya, Amelia Fitri Ariyani, Nadia Robiatul Adawiyah, Fitria Rahmawati, Yunita Rusmana Putri dan Surtini yang selalu membantu dan mendukung dalam situasi apapun
9. WAG yang berisikan M Ages Sandra Saputra, Moning, Angga, Aldi, Asep, Anwar, Aldi, Supendi, Tobi Yudistira, dan Diki yang selalu mnendengarkan keluh dan kesah saat penulisan skripsi
10. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya
11. Pendukung pengerjaan skripsi saya yaitu Milah Nuraini, Anisa, Rio, Andi, Ncek, Keny Rabila dan Tara Madarina.
12. Rekan-rekan kelas H yang telah memberikan bantuan, masukan, kritikan, dan saran-saran.
13. Kawan-kawan bimbingan Khadri, Julia, Dimas Fuja, dan Reni yang bersama-sama saling mendoakan juga menyemangati setiap pelaksanaan bimbingan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, serta penulis sangat berharap semoga skripsi yang disusun ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bogor, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HAK CIPTA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktik	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Pajak	8
2.1.1 Fungsi Pajak	10
2.1.2 Asas-asas Perpajakan	10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.4 Jenis Pajak	11
2.1.5 Tarif Pajak	12
2.1.6 Pajak Penghasilan	12
2.1.7 Subjek Pajak Penghasilan	13
2.1.8 Objek Pajak Penghasilan	14
2.2 Struktur Modal	16
2.2.1 Konsep Struktur Modal	16
2.2.2 Definisi Struktur Modal	17
2.2.3 Komponen Struktur Modal	17
2.2.4 Rasio Struktur Modal	18
2.2.5 Teori Struktur Modal	18
2.2.6 Faktor Penentu Struktur Modal	21
2.3 Manajemen Laba	22
2.3.1 Pengertian Manajemen Laba	22
2.3.2 Motivasi Manajemen Laba	22
2.3.3 Pola dan teknik Manajemen Laba	24
2.3.4 Model-model Pendeteksian Manajemen Laba	25
2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	26
2.4.1 Penelitian Terdahulu	26
2.4.2 Kerangka Pemikiran	31

2.4.2.1	Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) terhadap PPh Badan terutang	31
2.4.2.2	Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	31
2.4.2.3	Pengaruh DER dan Manajemen Laba dengan Pengungkapan PPh Badan	31
2.4.3	Hipotesis	32
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.3	Jenis Data dan Sumber Data Penelitian	33
3.4	Operasionalisasi Variabel	33
3.5	Metode Penarikan Sampel	34
3.6	Metode Pengumpulan Data	36
3.7	Analisis Data	36
3.7.1	Transformasi Data	36
3.7.2	Uji asumsi Klasik	36
3.7.3	Analisis Regresi Berganda	38
3.7.4	Pengujian Hipotesis	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	40
4.1.1.	Data <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Property & Real Estate</i> Periode 2013-2017	41
4.1.2	Data <i>Scaled Earning Changes</i> (SEC) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Property & Real Estate</i> Periode 2013-2017	43
4.1.3	Data Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Periode 2013-2017	44
4.2	Analisis Data	46
4.2.1	Transformasi Data	46
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	46
4.2.3.	Uji Hipotesis	50
4.2.4.	Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.3.	Pembahasan	54
4.3.1	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017	54
4.3.2	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017	55
4.3.3	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	

Perusahaan Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI	55
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian	55
4.4.1. Struktur Modal (X_1) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	55
4.4.2. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan	56
4.4.3 Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penerimaan pajak sektor <i>property</i> dan <i>real Estate</i>	1
Tabel 2.	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
Tabel 4.	Peroses seleksi sampel penelitian	35
Tabel 5.	Daftar perusahaan jasa sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> Periode 2013-2017	35
Tabel 6.	Proses Seleksi Sampel Perusahaan Sub Sektor <i>property</i> dan <i>real</i> <i>estate</i> yang Terdaftar di BEI	40
Tabel 7.	Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor <i>property</i> dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017	41
Tabel 8.	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Periode 2013-2017	42
Tabel 9.	<i>Scale erning changes</i> (SEC) Perusahaan manufaktur sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> Periode 2013-2017	43
Tabel 10.	Pajak penghasilan badan pada perusahaan <i>property</i> dan <i>real</i> <i>estate</i> periode 2013-2017	44
Tabel 11.	Hasil Uji Normalitas (Kolmogorof-Smirnov)	46
Tabel 12.	Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 13.	Hasil Uji Heteroskedastisitas Rank Spearman	49
Tabel 14.	Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 15.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	51
Tabel 16.	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	52
Tabel 17.	Hasil Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 18.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	53
Tabel 19.	Rata-rata struktur modal dan pajak penghasilan badan terutang	55
Tabel 20.	Rata-rata ML dan PPHB	56
Tabel 21.	Ringkasan Hasil Penelitian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. DER perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real Estate</i>	3
Gambar 2. Manajemen laba sub sektor <i>property</i> dan <i>real Estate</i>	5
Gambar 3. Kerangka Penelitian	32
Gambar 4. Hasil Pengujian normal probability plot	47
Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*
- Lampiran 2 Struktur Modal (DER)Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek IndonesiaPeriode 2013-2017
- Lampiran 3 Manajemen Laba (*SEC*)Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017
- Lampiran 4. *Market Value of Equity* (MVE) Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017
- Lampiran 5 PPH Badan Perusahn *Property* Dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi Indonesia dihadapkan dengan perekonomian yang tidak stabil. Dengan semakin berkembangnya perusahaan di Indonesia maka Indonesia tidak lagi bergantung pada sumberdaya alam sebagai pendapatan negara, dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pajak berkontribusi lebih banyak dibandingkan dengan sektor penerimaan negara lainnya. Menurut UU No. 36 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran negara.

Tabel 1
Penerimaan pajak sektor *property* dan *real Estate*
Dalam triliun rupiah

Tahun	2015	2016
Capaian	24,8	19,7
Jumlah wajib pajak	3.016	3.206

<https://katadata.co.id>

Pada tahun 2016 Direktorat Jendral (Ditjen) pajak menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor properti anjlok tahun lalu. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai 19,7 triliun atau turun 20,43% dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp. 24,8 triliun.

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Beban pajak merupakan suatu hal yang krusial bagi perusahaan, karena apabila beban pajak semakin tinggi maka laba bersih yang nantinya akan diterima oleh perusahaan akan berkurang. Dalam membayar pajak perusahaan perlu memahami peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, pemerintah melakukan perbaikan dalam penerimaan pajak. Kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak dilakukan melalui perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak dan penegakan hukum pajak.

Pada dasarnya perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pihak penerima pajak dan perusahaan sebagai pihak pembayar pajak. Pemerintah sebagai pihak pertama pajak pasti akan memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan perusahaan sebagai pihak pembayar pajak akan meminimalkan pembayarannya pajak, sehingga terjadi indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena setiap perusahaan menganggap pajak itu sebagai

beban yang harus dibayarkan tanpa memperoleh manfaat langsung atas beban yang dibayarkannya tersebut.

Cara meminimalisir beban pajak yang umum digunakan oleh perusahaan dan masih diperbolehkan, sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan memainkan tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat menyiasati dengan menggunakan teknik keuangan yang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan menggunakan utang. Sehingga utang menjadi struktur modal dalam perusahaan. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Semakin besar sumber modal dari utang, maka semakin besar bunga yang harus dibayar. Dengan demikian beban perusahaan juga semakin besar dan beban pajak semakin rendah. Modal dapat di peroleh melalui dua sumber, yaitu sumber internal perusahaan yang berasal dari arus kas bersih dari hasil usaha dan sumber eksternal perusahaan melalui penerbitan saham baru atau mencari utang melalui kreditur, baik dari lembaga keuangan atau dengan menerbitkan obligasi di pasar modal. Permasalahan yang sebenarnya akan muncul setelah perusahaan melakukan dana untuk modal, yaitu bagaimana komposisi modal atau lebih sering dikenal dengan istilah struktur modal perusahaan.

Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010) struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja dimana dana yang diperoleh menggunakan atau paduan sumber yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan labanya, perusahaan harus mampu menilai dan mengolah struktur modalnya yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dan memahami resiko yang akan ditanggungnya. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Utang dalam penelitian ini diukur dengan satu proksi, yaitu *debt to equity ratio* (DER). Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan menggunakan modal dari hutang ketika semakin besar sumber modal dari utang maka semakin kecil beban pajak, semakin besar bunga utang perusahaan maka pajak yang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam situasi tertentu, keadaan inilah yang dapat mendorong adanya penggunaan utang yang semakin besar didalam komponen struktur modal perusahaan dengan menggunakan utang sebagai struktur modal perusahaan maka perusahaan akan mendapatkan biaya tambahan yakni biaya bunga akan dibayarkan oleh perusahaan setiap periode sesuai dengan umur utang.

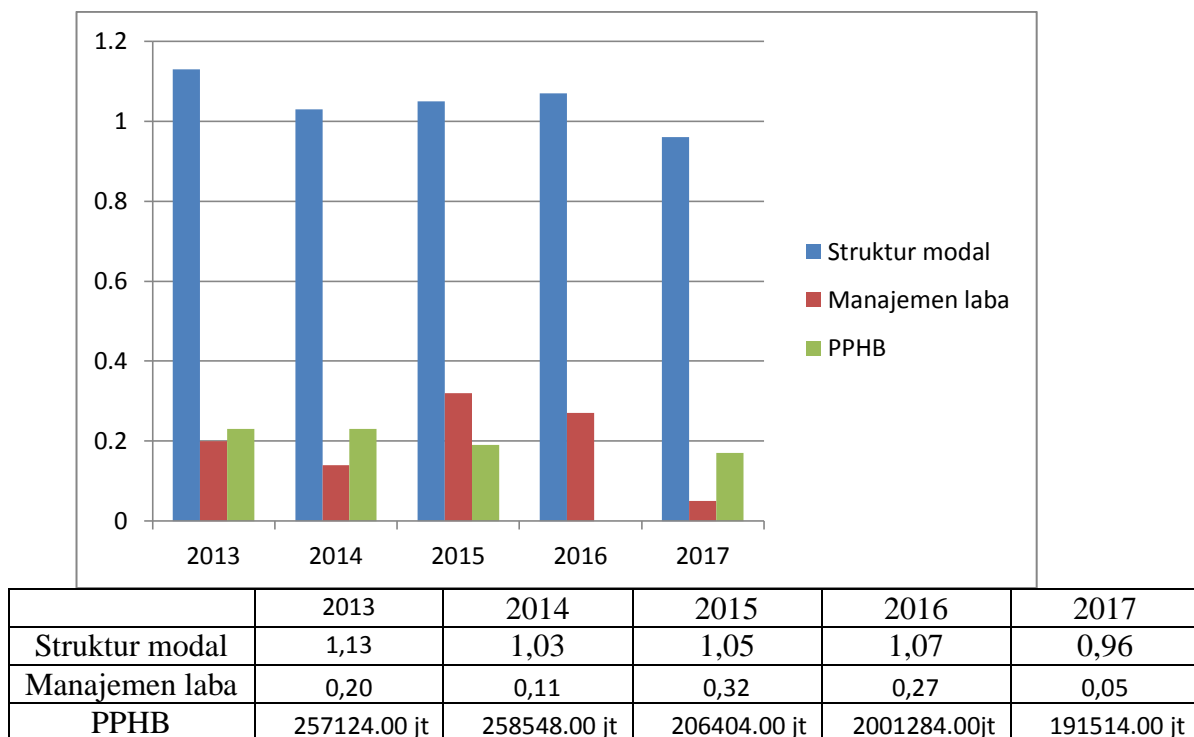
Dalam membayar pajak perusahaan tentunya akan dihitung berdasarkan laba perusahaan yang biasanya dicatat laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak perusahaan akan berkurang ketika struktur modal perusahaan menggunakan utang dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. Sehingga menggunakan utang dalam membiayai operasional perusahaan menjadi salah satu

cara perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, karena itu dapat menambah biaya usaha. Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha.

Selain memanfaatkan kebijakan bunga atas utang yang dapat dijadikan pengurangan beban pajak, cara lain juga digunakan untuk mengurangi beban pajak yakni dengan menggunakan manajemen laba.

Menurut Irham Fahmi (2013;279) manajemen laba didefinisikan *earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earning management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang menyajikan data-data kuantitatif atas semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Selain itu laporan keuangan merupakan media komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, antara lain pihak internal dan pihak eksternal, pihak internal yaitu manajemen, pihak eksternal adalah pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, pemasok, konsumen dan masyarakat. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba yang disajikan pada laporan laba rugi.

Laporan laba/rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang sangat penting, karena didalamnya mengandung informasi laba yang bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi laba juga dapat dijadikan panduan dalam melakukan investasi yang membantu investor maupun pihak lain dalam menilai *earning power* (kemampuan menghasilkan laba) perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, laba pada umumnya dipandang deviden, dan pengambilan keputusan. Adanya kecenderungan memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong munculnya *earning management* (manajemen laba). Praktik manajemen laba dilakukan guna mereayasa angka laba perusahaan, perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manager untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak. Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba.



(Sumber: data diolah penulis, 2018)

Gambar 1

Struktur modal, Manajemen laba dan Pajak penghasilan badan sub sektor *property* dan *real Estate*

Fenomena perusahaan sektor *property* dan *real Estate*:

Berdasarkan data grafik diatas laba dan pajak yang ada dalam perusahaan subsector *property* dan *real estate* selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Menunjukkan pada tahun 2013 struktur modal 1,13 manajemen laba sebesar 0,20 dan pajak 257.124 jt. Pada tahun 2014 struktur modal perusahaan turun menjadi 1,03, manajemen laba perusahaan turun menjadi 0,11 dan pajak terutang perusahaan malah mengalami kenaikan menjadi 257.124 jt. Pada tahun 2016 struktur modal naik menjadi 1,07, manajemen laba perusahaan turun menjadi 0,27 dan pajak terutang perusahaan turun menjadi 2001284.00 jt. Pada tahun 2017 struktur modal perusahaan megalami penurunan menjadi 0,96, manajemen laba perusahaan turun menjadi 0,05 dan pajak terutang perusahaan mengalami penurunan juga menjadi 191514.00 jt.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Endah Nilam Rahmadani (2010) tentang pengaruh *Debt Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan bahwa hasil *Debt Equity Ratio* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, yang berarti semakin besar Debt to Equity Ratio maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang, Andi Azhari (2015) tentang pengaruh *Debt Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan bahwa hasil *Debt Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang dan manajemen laba mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Patar Simamora

dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015) tentang pengaruh *Debt Equity ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan hasil bahwa *Debt Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang dan manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan pendapatan pajak pemerintah pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate* ditahun 2016
2. Penggunaan hutang dapat menjadikan alternatif dalam meminimalisir pembayaran pajak.
3. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan subsektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2.2 Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Apakah Struktur Modal yang diproksikan dengan DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan subsektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di BEI?
2. Apakah manajemen laba yang diproksikan dengan SEC berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Struktur Modal yang diproksikan dengan DER dan manajemen laba yang diproksikan dengan SEC secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di BEI?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi melalui BEI yang dibutuhkan oleh penulis sebagai sarana dalam melakukan penelitian. Data yang

penulis butuhkan untuk mempermudah dalam proses pembahasan mengenai Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di BEI.

Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi permasalahan yang sesungguhnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Struktur Modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh Manajemen Laba terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji Pengaruh Struktur Modal dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang Pada Perusahaan sub sektor sektor *property* dan *real Estate* yang Terdaftar Di BEI.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Dari penelitian ini, yang diharapkan oleh penulis adalah dapat memberikan masukan dan saran sebagai perbandingan dan pengembangan terhadap Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

1.4.2. Kegunaan Praktik

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada perusahaan dalam mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.
2. Bagi pemerintah
Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
3. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan menambah wawasan pengetahuan mengenai relevansi antara teori yang didapat melalui pembelajaran dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.

4. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sub Sektor sektor *property* dan *real Estate*, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian dalam penulisan karya ilmiah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan pemungutan wajib pajak atau dipaksakan kepada rakyat.

Beberapa definisi tentang pajak yaitu, menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU Perpajakan Nasional “Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat yang berhak memungut pajak adalah negara, berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara secara langsung dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat kita.

Smeeths (2012), pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.

Menurut Andriani (2012), pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

Anderson (2012), pajak ialah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan bukan suatu akibat dari pelanggaran tetapi sebuah kewajiban

berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya imbalan dan dilakukan untuk mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya.

Menurut Djajaningrat (2012), pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Fieldman (2012), pajak yaitu sebuah prestasi yang sifatnya paksaan sepihak kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan tanpa adanya kontraprestasi dan gunanya untuk menutupi segala pengeluaran umum dari sebuah negara.

Pajak adalah iuran negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2011)

Dari definisi pajak tersebut jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional, kewajiban perpajakan dalam setiap negara diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Terdapat berbagai jenis macam pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut sifat, menurut golongan dan menurut lembaga pemungutannya. Menurut Purwono (2010:10-11), ada tiga jenis kelompok pajak yaitu, 1) menurut golongan, 2) menurut sifat, 3) menurut lembaga pemungut.

5. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
6. Menurut sifat
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
7. Menurut lembaga pemungut
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok;
- 2) Pajak kota/kab, terdiri dari:
Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak rokok, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2007) fungsi pajak dibagi menjadi empat, yaitu fungsi budgetair, regulerend, demokrasi, dan distribusi. Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi budgeter, adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi dari pajak, adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.2 Asas-asas Perpajakan

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2003), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*, diantaranya adalah *equity*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*, yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. *Equality* adalah supaya tekanan pajak antara subjek masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.
2. *Centrinity*, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat di mulur-mulur atau di tawar-tawar (*not arbitrary*)

3. *Efficiency*, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009) terbagi menjadi *official assesment*, *self assesment*, dan *withholding system*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

1. *Official assesment*
Sebelum adanya pembaharuan, pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *official assessment*. Dimana ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Self assesment*
Dari sistem *official assesment* yang digunakan sejak zaman penjajahan belanda tidak sesuai lagi dengan adanya pembaharuan perpajakan, maka sistem pemungutan pajak menjadi sistem *self assessment*, maksudnya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melapor ke kantor pelayanan pajak.
3. *Withholding system*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya dengan *fiskus*. Dengan demikian sistem yang berlaku sejak adanya pembaharuan perpajakan adalah sistem *self assessment* dan *withholding system*.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, dan menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan objektif, yaitu:

1. Menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya:
 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan dengan karakteristiknya yang sangat dominan masuk kedalam pengelompokkan pajak langsung dengan alasan-alasan bahwa sifat dari pajak penghasilan itu sendiri masuk kedalam kelompok pajak langsung.

2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2015) ada 4 macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding atau proposional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.
3. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
 - 1) Tarif progresif-progresif : kenaikan presentase semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
 - 3) Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil
4. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2.1.6 Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan (pph) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang pph disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak untuk penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Menurut Saiful dalam Andy Azhari (2015) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.7 Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek adalah siapa yang dikenakan pajak. Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Penjelasan dari masing-masing subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi;
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.
3. Badan;
Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Bentuk usaha tetap (BUT);
Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;
 - g. Pertambangan dan penggalan sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
 - h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan;
 - i. Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan;

- j. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- k. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kedua jenis subjek pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- 4. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 5. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 6. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.8 Objek Pajak Penghasilan

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. Objek PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal;
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Berdasarkan empat kategori tersebut di atas, sesuai dengan pasal 4 ayat(1) Undang-undang PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;
2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau Pengusaha Kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti;
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
13. Premi asuransi

14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2 Struktur Modal

Struktur modal adalah perbandingan antar modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam ini adalah hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimalkan harga saham. Untuk itu dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang akan mempengaruhinya. Struktur modal merupakan masalah penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan.

Keputusan struktur modal yang ditentukan oleh setiap perusahaan tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas operasional perusahaan saja, tetapi juga akan berpengaruh terhadap resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan meningkatkan utang, maka perusahaan tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan resiko keuangan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan harus memperhatikan masalah pajak apabila menurunkan tingkat utang. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menentukan keputusan struktur modalnya secara cermat dengan perbandingan dengan berbagai tinjauan yang tepat.

Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak diatur dalam peraturan menteri keuangan 169/PMK. 010/2015 yang diterbitkan pada tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur peraturan derokterat jendral pajak per 25/p/2017 bahwa “besarnya perbandingan antar utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4;1).

2.2.1 Konsep Struktur Modal

Menurut Thomas Chopeland (2010) modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan sehari-hari.

Menurut Lukas Setia Atmaja (2002) modal adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan aktiva dan operasi perusahaan modal terdiri dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca, yaitu utang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan.

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud modal adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan aktiva dengan umur lebih dari satu tahun dan untuk pembiayaan operasi perusahaan.

2.2.2 Definisi Struktur Modal

Menurut Husnan (2000), struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai pertimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. (Riyanto,2001). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

Menurut Rodoni dan Ali (2010) struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana diperoleh menggunakan atau panduan sumber ang berasal darin dalam dan luar perusahaan.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan struktur modal adalah perbandingan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan anantara modal asing dengan modal sendiri.

2.2.3 Komponen Struktur Modal

Menurut Warsono (2003) struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hutang jangka panjang (*long term debt*)
Menurut Keown (2004) hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga pertahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).
2. Modal sendiri (*equity*)
Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada 2 (dua) sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Saham preferen
Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.
- b. Modal saham biasa
Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset telah dipenuhi.

2.2.4 Rasio Struktur Modal

Weston dan Copeland memberikan suatu konsep tentang faktor leverage sebagai rasio proksi dari struktur modal. Faktor leverage adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ($debt = D$) terhadap total aktiva ($total\ aset = TA$) atau nilai total perusahaan. Bila membahas tentang total aktiva, yang dimaksudkan adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan catatan akuntansi. Nilai total perusahaan berarti total nilai pasar seluruh komponen struktur modal perusahaan.

Rasio *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan utang) terhadap total ekuitas, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Sawir,2003)

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$$

Long term to asset ratio merupakan rasio utang jangka panjang dan aset, yaitu pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah utang jangka panjang dengan jumlah aset, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. (Sawir,2003)

$$Long\ Term\ Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Long\ Term\ Debt}{Total\ Asset}$$

Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari utang, saham preferen, dan modal pemegang saham.

2.2.5 Teori Struktur Modal

Menurut Brigham dan Houston (2001) teori mengenai struktur modal modern bermula pada tahun 1958, ketika Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller (yang selanjutnya kita sebut MM), mempublikasikan apa yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. Berdasarkan serangkaian asumsi yang sangat membatasi, MM membuktikan bahwa nilai suatu

perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan perkataan lain, hasil-hasil MM menyatakan bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan

Membiayai operasinya, jadi struktur modal tidak relevan. Tetapi, studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain:

1. Tidak ada biaya broker (pialang).
2. Tidak ada pajak.
3. Tidak ada biaya kebangkrutan.
4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan di masa mendatang.
5. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang.

Menurut Brigham dan Houston (2001), meskipun beberapa dari asumsi-asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil-hasil MM yang tidak relevan sangat penting artinya. Dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal agar menjadi relevan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi-asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut (Brigham dan Houston, 2001:32), meskipun beberapa dari asumsi- asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil-hasil MM yang tidak relevan sangat penting artinya. Dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal agar menjadi relevan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan.²¹ Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi-asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut:

1. Efek Pajak

MM menerbitkan makalah lanjutan pada tahun 1963 yang melemahkan asumsi tidak ada pajak perseroan. Peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Perlakuan yang berbeda ini mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal mereka. Sebenarnya, MM memperlihatkan bahwa jika semua asumsi yang lain berlaku, perbedaan perlakuan ini menyebabkan suatu situasi yang memerlukan pembelanjaan dengan 100 persen utang. Akan tetapi, kesimpulan ini diubah beberapa tahun kemudian oleh Merton Miller (kali ini tanpa Modigliani) ketika ia membahas efek dari pajak perorangan. Ia menyatakan bahwa semua penghasilan dari obligasi pada umumnya adalah bunga, yang dikenakan pajak

sebagai penghasilan perorangan pada tarif yang mencapai 39,6 persen, sementara penghasilan dari saham biasanya sebagian berasal dari dividen dan sebagian dari keuntungan modal. Selanjutnya, keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28 persen, dan pajak ini ditangguhkan sampai saham itu terjual dan keuangan terealisasi. Jika saham itu ditahan sampai si pemilik meninggal, tidak ada pajak keuntungan modal biasa dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah daripada pengembalian atas utang. Karena situasi pajak ini, Miller berpendapat bahwa investor bersedia menerima pengembalian atas saham sebelum pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan pengembalian atas obligasi sebelum pajak. Jadi, seperti yang dikemukakan Miller, dapat dikurangkannya bunga untuk tujuan pajak menguntungkan penggunaan pembiayaan dengan utang, tetapi perlakuan pajak yang lebih menguntungkan atas penghasilan dari saham menurunkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada saham dan dengan demikian menguntungkan penggunaan pembelanjaan dengan ekuitas

2. Efek Biaya Kebangkrutan

Menurut Brigham dan Houston (2001), masalah yang berkait kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya. Karena itu, biaya kebangkrutan menghalangi perusahaan menggunakan utang yang berlebihan. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen: probabilitas terjadinya dan biaya-biaya yang akan timbul bila kesulitan keuangan telah muncul. Perusahaan yang labanya lebih labil, bila semua hal lain sama, menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar sehingga harus menggunakan lebih sedikit utang daripada perusahaan yang stabil.

3. Trade-off

Argumen-argumen terdahulu mengarah pada perkembangan yang disebut dengan teori trade-off dari leverage, di mana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak perseroan yang menguntungkan) dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi.

4. Teori Pengisyaratkan

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa MM mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para manajer, ini disebut kesamaan informasi (*symmetric information*). Akan tetapi, dalam kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik daripada investor luar. Hal ini disebut ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal.

2.2.6 Faktor Penentu Struktur Modal

Menurut Moeljadi penentuan struktur modal perlu mempertimbangkan beberapa hal, yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Kemampuan dana intern
Jika tujuan manajer adalah memaksimalkan kemakmuran/kekayaan para pemegang saham, maka struktur modal yang optimal adalah yang dapat memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan apabila tujuan para manajer memaksimalkan keamanan pekerjaannya, maka struktur modal yang optimal terletak pada leverage rata-rata perusahaan lain dalam satu industri.
2. Tingkat *leverage* perusahaan dalam satu industry
3. Kemampuan dana intern
Penentu utama dana intern adalah tingkat pertumbuhan pendapatan. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi memungkinkan manajemen memperoleh dana yang lebih besar daripada laba ditahan yang akan mengurangi dana pinjaman.
4. Pemusatan kepemilikan dan pengendalian suara
Apabila saham yang ada dalam perusahaan hanya dimiliki oleh sejumlah kecil pemilik, maka manajer akan segan untuk mengeluarkan saham baru.
5. Batas kredit
Usaha manajemen untuk menyesuaikan leverage dengan yang lain diinginkan dipengaruhi oleh sikap kreditor terhadap perusahaan tersebut.
6. Ukuran Perusahaan
Suatu perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.
7. Pertumbuhan aktiva perusahaan
Pertumbuhan aktiva dapat dijadikan indikator bagi kesempatan pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang, sebab dapat memberikan gambaran bagi kebutuhan dana secara total dalam perusahaan tersebut.
8. Stabilitas *Earnings*
Berhubung *variabilitas earnings* dapat menjadi ukuran risiko bisnis suatu perusahaan, maka calon kreditor cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mempunyai *earnings* yang relatif stabil.
9. Biaya modal sendiri
Karena biaya modal sendiri (*cost of equity*) dapat merefleksikan harga saham, maka turun naiknya harga saham akan menunjukkan harapan bagi *equity financing* yang murah/mahal yang dapat mengakibatkan dept financing menjadi kurang/lebih menarik. Perubahan harga saham akan mempunyai hubungan yang negatif dengan rasio leverage
10. Biaya utang
Jika biaya utang krentabilitas aktiva maka penambahan utang akan membawa efek yang *unfavourable* bagi rentabilitas modal sendiri.

11. Tarif pajak

Karena pembayaran bunga merupakan *tax-deductible* bagi perusahaan, maka *debt-financing* akan lebih menarik daripada *equity-financing*.

2.3 Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai upaya manager perusahaan untuk intervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi istilah intervensi di pakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa managerial ini bukan sebagai kecurangan alasannya, intervensi itu di lakukan manager perusahaan dalam kerangka standar akuntansi yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi di terima dan diakui secara umum manajemen laba terjadi ketika para manager menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka akuntansi yang di laporkan dalam laporan akuntansi.

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manager perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ndan kondisi perusahaan istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktifitas rekayasa menejerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manager perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang di terima dan di akui secara umum.

Menurut Healy dan Wahlen, manajemen laba terjadi ketika para manager menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

2.3.2 Motivasi Manajemen Laba

Secara umum terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan *creative accounting* atau manajemen laba, yaitu:

14. Motivasi Bonus.

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manager dalam

menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

15. Motivasi Utang.

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu motivasi pajak. Untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

16. Motivasi *Initial Public Offering* (IPO).

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

17. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

18. Motivasi Politis.

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan strategis semisal perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa motivasi yang mendorong terjadinya manajemen laba, namun yang sejalan dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari motivasi perpajakan (*taxation motivations*). Scott mengemukakan bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Intinya manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

2.3.3. Pola dan teknik Manajemen Laba

Menurut Scott ada empat pola manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:

1. *Taking a bath*

Manajemen laba dengan pola *taking a bath* biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan reorganisasi termasuk saat pergantian CEO. *Taking a bath* dilakukan dengan melaporkan rugi yang besar pada periode sekarang.

2. *Income Minimization*

Income minimization adalah pola manajemen laba yang serupa dengan *taking a bath* namun dalam bentuk yang tidak terlalu ekstrim. *Income minimization* dilakukan dengan memilih *kebijakan* yang dapat meminimalkan laba seperti penghapusan beberapa aset dan *intangible asset*, beban pemasaran, dan beban R&D.

3. *Income Maximization*

Manajer melakukan *income maximization* dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan agar bisa mencapai *bogey* dalam skema bonus. Namun *income maximization* yang dilakukan akan berhenti ketika sudah mencapai depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*)
Mengubah periode depresiasi

4. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi
Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi, misalnya. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.
5. Menggeser periode biaya atau pendapatan
Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya:
 - a. Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - b. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
 - c. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - d. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
 - e. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

2.3.4. Model-model Pendeteksian Manajemen Laba

Menurut sulistyono (2008), manajemen laba biasanya diteliti dengan cara pembentukan hipotesa oleh peneliti kemudian manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan menggunakan metode yang tepat secara umum ada tiga cara yang telah di hasilkan oleh para peneliti untuk pendekatan manajemen laba yaitu:

1. Model berbeda *aggregate*
Model berbasis *aggregate accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.
 - a. *The Healy Model (1985)*
Model healy (1985) merupakan model yang relative sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba.
 - 1) Alasan menggunakan total akrual adalah sebagai berikut:
Total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen laba baik itu menaikkan maupun menurunkan laba.
 - 2) Total akrual mencerminkan keputusan manajemen, yaitu untuk menghapus aset pengakuan atau penunda pendapatan dan menganggap biaya atau model suatu pengeluaran.
 - b. *The De Angelo Model (1986)*
Model ini untuk mendeteksi manajemen laba di kembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986, secara umum model ini juga menghitung

modal aktual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut:

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ operations$$

Model *De Angelo* mengukur atau memproksi manajemen laba dengan *distrionary acctrual*, yang dihitung dengan menggunakan total aktual akhir periode yang di skala dengan total aktiva periode tahun sebelumnya.

2. Model Berbasis Specific Actruals

Model yang berbasis aktual (*specific actruals*) yaitu pendekatan yang menghitung aktual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen keuangan tertentu dari industry tertentu atau cadangan kerugian piutang industry asuransi (Sulistyo, 2008).

3. Model berbasis *distribution of earning*

Model *distribution of earning after* manajemen dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichep, di Georgi, Patel, dan Zeehauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi pada pergerakan laba di sekitar *benchmark* yang dipakai, misalnya laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah insedence jumlah yang berada di atas maupun di bawah *benchmark* telah didistribusikan secara merata atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban kebijakan yang menjalankan kebijakan (Sulistyo, 2008)

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur menggunakan pendekatan distribusi laba berdasarkan *scaled earning changes*. Karena *scaled earning changes* lebih memperhatikan perubahan laba dari tahun ketahun sehingga akan lebih pas untuk melihat perkembangan manajemen laba suatu perusahaan. Adapun rumus untuk mengukur manajemen laba adalah sebagai berikut:

$$Scaled\ Earning\ changes = \frac{Net\ Income - Net\ Income_{(t-1)}}{MVE_{(t-1)}}$$

MVE = jumlah saham beredar (t-1) X harga saham (t-1)
--

2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan, ini mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan acuan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Penelitian Andi azhari

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2015 dengan judul Pengaruh struktur modal dan Manajemen Laba terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pada

Perusahaan Sub sektor *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun (2013 – 2014). Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu LDAR, DER dan manajemen laba variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen LDAR, DER dan manajemen laba variabel dependen pajak penghasilan badan terutang dan perbedaan terletak pada variabel independen yaitu LDAR .

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan Sub sek yang terdaftar di BEI atau diakses www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Penarikan jumlah sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda dan statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, DER tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan manajemen laba diukur dengan *Total Accrual* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2. Penelitian Simamora dan Ryadi

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2015 dengan judul Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan sub sektor semen Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010-2013). Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu LDAR, DER, variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen DER dan variabel dependen pajak penghasilan badan terutang serta perbedaan terletak pada variabel LDAR dan manajemen laba.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau diakses www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Penarikan jumlah sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda dan statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. *DER* juga berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

3. Penelitian Endah Nilam Ramadani

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2010 dengan judul Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2005-2009). Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu LDAR, DER, variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen DER dan variabel dependen pajak penghasilan badan terutang serta perbedaan terletak pada variabel LDAR dan manajemen laba.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau diakses www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Penarikan jumlah sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda dan statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. *DER* juga berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

4. Penelitian Abdullah Khoirul Anwar

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2018 dengan judul Pengaruh struktur modal dan Manajemen Laba terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pada Perusahaan sub sektor *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu LDAR, DER dan manajemen laba variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen LDAR, DER dan manajemen laba variabel dependen pajak penghasilan badan terutang dan perbedaan terletak pada variabel independen yaitu LDAR.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau diakses www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Penarikan jumlah sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda dan *moderated regression analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan LDAR dan DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan

manajemen laba diukur dengan *Scaled Earning Change* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

5. Penelitian Yulianti

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2014 dengan judul Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013). Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu LDAR, DER, variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen DER dan variabel dependen pajak penghasilan badan terutang serta perbedaan terletak pada variabel LDAR dan manajemen laba.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau diakses www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Penarikan jumlah sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda dan statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. DER juga berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Publikasi
1.	Andi Azhari (2015)	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	<ul style="list-style-type: none"> Variabel x Struktur modal (LDAR, DER) dan manajemen laba Variabel y Pajak Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> Berpengaruh signifikan dengan arah kofisien positif terhadap pajak penghasilan (pph) terutang Tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan (pph) terutang Tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan (pph) terutang 	Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
2.	Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015)	pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	<ul style="list-style-type: none"> Variabel x Struktur modal (LDAR, DER) Variabel y Pajak penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> Berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang berpengaruh signifikan secara 	Universitas Pakuan, 2015

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Publikasi
			badan terutang	terhadap apajk penghasilan badan terutang	
3.	Endah Nilam Ramadani (2010)	Analisis pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel x Struktur modal (LDAR, DER) • Variabel y Pajak penghasilan badan terutang 	<ul style="list-style-type: none"> • Longterm debt to asset ratio (LDAR) berpengaruh negative terhadap Pph badan terutang. • Debt to equity ratio (DER) atau rasio hutang mampu mempengaruhi pph badan terutang • Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa longterm debt to asset ratio (LDAR) dan debt to equity ratio (DER) secara bersama sama mampu mempengaruhi pph badan terutang 	Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
4.	Abdullah Khoirul Anwar(2018)	<ul style="list-style-type: none"> • pengaruh struktur modal dan manajemen dan laba terhadap pajak penghasilan badan terutang 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel x Struktur modal dan manajemen laba • Variabel y Pajak penghasilan badan terutang 	Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen	Universitas Pakuan 2018
5.	Yulianti (2014)	pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel x Struktur modal • Variabel y Pajak penghasilan badan terutang 	Variabel independen berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang	Universitas Pakuan, 2014

2.4.2 Kerangka Pemikiran

2.4.2.1 Pengaruh struktur modal yang di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh Badan terutang

Debt to Equity Ratio (DER), merupakan suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total *debt*) dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Azhari (2015) tentang pengaruh DER terhadap PPh badan terutang yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, Simamora dan Ryadi (2015) tentang pengaruh DER terhadap pajak penghasilan badan yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Endah nilam (2010) pengaruh DER terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Abdullah Khoirul Anwar (2018) tentang pengaruh DER terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Yulianti (2014) tentang pengaruh DER terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2.4.2.2 Pengaruh Manajemen Labayang di proksikan dengan *scaled earning changes* (SEC) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi pajak. Berbagai metode akuntansi digunakan pihak manajemen dalam rangka penghematan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi azhari (2015) tentang pengaruh Manajemen Laba terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menyatakan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Abdullah Khoirul Anwar (2018) tentang pengaruh Manajemen Laba terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menyatakan bahwa Manajemen Laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

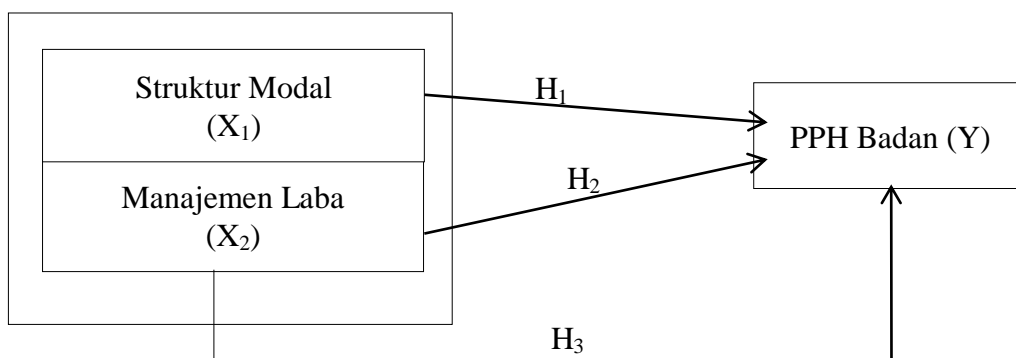
2.4.2.3 Pengaruh truktur modal yang diproksikan dengan DER dan Manajemen Laba yang diproksikan dengan *scaled earning changes* terhadap pajak penghasilan badan terutang

Struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya *Debt to Equity Ratio* (DER) dan manajemen laba

terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Azhari (2015) tentang pengaruh der dan Manajemen Laba terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menyatakan bahwa DER dan Manajemen Laba sam-sama tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Abdullahkhourul Anwar (2018) yang menyatakan bahwa DER dan Manajemen Laba bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang (leverage) akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki leverage, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya dan menggunakan Manajemen Laba untuk kepentingan perusahaan. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneliti apakah ada pengaruh dari struktur modal terhadap PPh badan terutang perusahaan. Dalam penelitian ini, digunakan variabel struktur modal yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Manajemen Laba. Berikut ini akan diajukan kerangka teori penelitian mengenai pengaruh DER dan Manajemen Laba terhadap PPh badan terutang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, berikut ini merupakan gambar 2 yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini :



Gambar 3
Kerangka Penelitian

2.4.3 Hipotesis

- H1 : Struktur Modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan (pph) badan terutang.
 H2 : Manajemen Laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan (pph) badan.
 H3 : Struktur Modal dan Manajemen Laba bersama-sama berpengaruh simultan terhadap pajak penghasilan (pph) badan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu struktur modal dan manajemen laba terhadap variabel independen yaitu beban pajak penghasilan badan pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu struktur modal dan manajemen laba. Serta variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan. pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa organization, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih melakukan riset data pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. dimana lokasinya adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif yang merupakan data sekunder berupa laporan keuangan (annually report) dari perusahaan jasa subsektor *property* dan *real estate* selama lima periode, yaitu tahun 2013-2017 dan diperoleh melalui situs homepage Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu (www.idx.co.id). Jurnal akuntansi, situs resmi perusahaan dan melalui media beperantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variable penelitian ke dalam dua kelompok:

5. Variabel Independen (X)

Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel dependen akan terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah struktur modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal utang jangka panjang.

c. Struktur modal yang diproksian terhadap oleh *Debt Equity Ratio*(X1)

Rasio *Debt Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan utang) terhadap total ekuitas.

d. Manajemen Laba (X2)

Manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba berdasarkan *scaled earning changes*.

6. Variabel Dependen (y)

Merupakan variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen) atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah pajak penghasilan badan terutang.

Tabel 3
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Struktur Modal 4. <i>Debt Equity Ratio</i>	5. Total <i>liabilitas</i> 6. Total <i>ekuitas</i>	$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$	Rasio
Manajemen Laba 7. <i>Scaled Earning Changes</i> (SEC)	8. <i>Net Income</i> 9. <i>Market Value of Equity</i> (jumlah saham beredar X harga saham)	$\frac{\text{Net Income} - \text{Net Income} (t - 1)}{\text{MVE} (t - 1)}$	Rasio
Beban pajak penghasilan badan	10. Laba sebelum pajak 11. Tarif pajak penghasilan badan	Laba sebelum pajak yang telah direkonsiliasi X Tarif pajak penghasilan badan	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah popuylasinya). Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *metode purposive sampling* adalah penentuan sampel

berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
2. Perusahaan tidak delisting selama periode pengamatan
3. Perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013–2017.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria ada 18 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Adapun proses seleksi sampel dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Proses seleksi sampel penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2012-2017	48
Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI dari tahun 2012	(13)
Perusahaan tidak delisting selama periode pengamatan	(5)
Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013–2017.	(12)
Jumlah Emiten yang terpilih (memenuhi kriteria)	18

(Sumber: Data di olah oleh penulis).

Tabel 5
Daftar perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate*
Periode 2013-2017

No	Kode perusahaan	Nama perusahaan
1	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
2	ASRI	PT Alam Sutra Reality Tbk.
3	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk.
4	SMDM	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.
5	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
6	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk.
7	CTRA	PT Ciputra Development Tbk.
8	DART	PT Duta Anggoda Reality Tbk.
9	DILD	PT Intiland Developmnt Tbk.
10	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk
11	GPRA	PT Perdana Gapura Tbk.
12	KIJA	PT Kawasan Industri Kababek Tbk
13	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.
14	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk.
15	MDLN	PT Modern Land Reality Tbk.
16	MKPI	PT Metropolitan Kenjana Tbk.
17	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.
18	SMRA	PT Sumarecon Agung Tbk.

(Sumber www.idx.co.id diolah oleh penulis)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Peneliti memperoleh data-data penelitian yang bersumber dari:

- 3) Penelitian pustaka (*library research*)
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 4) Penelitian lapangan (*field research*)
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan penerbit daftar efek syariah sektor property dan real estate di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, persyaratan suatu model regresi yang baik dapat dipenuhi jika model yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu akan diuji dengan uji asumsi klasik.

3.7.1 Transformasi Data

Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Pada penelitian ini menggunakan transformasi data jenis logaritma. Transformasi data pada penelitian ini bertujuan untuk memenuhi uji asumsi klasik pada penelitian ini.

3.7.2 Uji asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

1. Uji normalitas data (Kolmogorov smirnov)
Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut:
 4. Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

5. Pengujian normal probability plot menurut Ghozali (2016), yaitu sebagai berikut:
 - 4) Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.
 - 5) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

2. Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolienaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolienaritas.

Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolienaritas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF), korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolienaritas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolienaritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolienaritas.

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolienaritas adalah sebagai berikut:

1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
2. Menambah jumlah observasi.
3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik scatterplot. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel dependen melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat

kepercayaan 5%. Sementara itu diagram scatterplot dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghazali,2016):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu obeservasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali,2016).

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel dependen yang sudah diketahui besarnya. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linier berganda. Adapun variabel independen terdiri dari Struktur Permodalan yang diproksikan dengan *Debt Equity Ratio* dan Manajemen Laba yang dihitung melalui pendekatan model Friedlan (1994). Sedangkan variabel dependennya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : beban pajak penghasilan
a : Konstanta
B1,B2 : Koefisien Regresi
X1 : Struktur Modal
X2 : Manajemen Laba
E : *Error*

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linear berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Dalam analisis regresi penulis menggunakan tiga pengujian yaitu secara parsial (Uji t), secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan koefisien determinasi (R^2)

3. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Uji ini digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen *debt to equity ratio* dan manajemen laba terhadap variabel dependen pajak penghasilan badan terutang. Besarnya koefisien determinasi dilihat dari nilai *adjusted R-squared* (R^2) pada koefisien regresinya.

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Untuk itu perlu dilakukan uji F atau ANOVA yang dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan untuk penelitian dengan *probability value* dari hasil penelitian. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F:

3. Taraf signifikansi $\alpha = 0,05$

4. Kriteria pengujian dimana H_0 diterima apabila $p \text{ value} < \alpha$ dan H_0 ditolak apabila $p \text{ value} > \alpha$

5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Imam Ghozali, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian ini adalah struktur modal (X) sebagai variabel independen dengan proksi *debt to equity ratio*, manajemen laba dengan proksi *scaled earning changes* dan pajak penghasilan badan (Y) sebagai variabel dependen. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dengan sampel sebanyak 10 perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Sumber data penulisan yaitu www.idx.co.id, sebagai sumber data laporan keuangan dan jumlah perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penentuan sampel dengan *purposive sampling* atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu pada perusahaan sub sektor makanan & minuman periode 2013-2017. Jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan dari hasil pengambilan sampel secara *purposive sampling* didapatkan hasil berjumlah 10 perusahaan. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6.
Proses Seleksi Sampel
Perusahaan Sub Sektor *property* dan *real estate* yang Terdaftar di BEI

No.	Kriteria	Sampel
1	Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.	48
2	Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI dari tahun 2012	
3	Perusahaan tidak di-delisting selama periode pengamatan	(5)
4	Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013–2017.	(12)
5	Data outlaier	(8)
	Jumlah Emiten yang terpilih (memenuhi kriteria)	10

(Sumber: Data di olah oleh penulis).

Berdasarkan tabel 6 pengambilan sampel secara *purposive sampling* diatas, sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu perusahaan sub sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2012-2017, perusahaan sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang tidak delisting selama periode penelitian, perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, dan data outlier. Dari hasil pembatasan sampel maka dapat diperoleh sampel penelitian yaitu 10 perusahaan yang dijelaskan dalam tabel 7 dengan nama perusahaan sebagai berikut:

Tabel 7
Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor *property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk	APLN
2	PT Alam Sutra Reality Tbk	ASRI
3	PT Ciputra Development Tbk	CTRA
4	PT Duta Pertiwi Tbk	DUTI
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk	GPRA
6	PT Lippo Karawaci Tbk	LPKR
7	PT Modernland Reality Tbk	MDLN
8	PT Metropolitan kentjana Tbk	MKPI
9	PT Pakuwon Jati Tbk	PWON
10	PT Summarecon Agung Tbk	SMRA

(Sumber: www.sahamok.co.id diolah oleh penulis)

4.1.1. Data *Debt to Equity Ratio* (DER) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Property & Real Estate* Periode 2013-2017.

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui *financial leverage* perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk Pengukuran persentase dana dapat dilakukan dengan membagi total hutang dengan total ekuitas perusahaan. Jika ditulis dalam bentuk rumus maka seperti dinyatakan berikut ini : (Sumber: Ramdhani,2010).

$$DER = \frac{Debt}{Equity}$$

Keterangan:

DER : Rasio Utang terhadap Ekuitas

Debt : Total hutang

Equity : Total Ekuitas (modal sendiri)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan dilakukan perhitungan *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan manufaktur sub sektor *Property & Real Estate* periode 2013-2017, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 8
Debt to Equity Ratio (DER)

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2013-2017

No.	KODE EMITEN	DER				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APLN	1,73	1,80	1,71	1,58	1,50
2	ASRI	1,71	1,66	1,83	1,81	1,42
3	CTRA	1,06	1,02	1,01	1,03	1,05
4	DUTI	0,24	0,30	0,32	0,24	0,27
5	GPRA	0,66	0,72	0,66	0,55	0,45
6	LPKR	1,21	1,15	1,18	1,07	0,90
7	MDLN	1,06	0,95	1,12	1,20	1,06
8	MKPI	0,48	0,22	0,21	0,78	0,50
9	PWON	1,27	1,03	0,99	0,88	0,83
10	SMRA	1,93	1,47	1,49	1,55	1,59
	MEAN	1,13	1,03	1,05	1,07	0,97
	MAX	1,93	1,80	1,83	1,81	1,59
	MIN	0,24	0,22	0,21	0,24	0,27

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2019).

Berdasarkan tabel 8 nilai rata-rata *Debt to Equity Ratio (DER)* pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,13 dan menjadi perusahaan yang memiliki nilai DER terendah dimiliki PT DUTI yaitu sebesar 0,24 sedangkan nilai tertinggi dimiliki PT SMRA yaitu sebesar 1,93. Pada tahun 2014 mengalami penurunan nilai rata-rata DER menjadi 1,03. Nilai DER terendah dimiliki PT MKPI sebesar 0,22 dan nilai tertinggi di miliki PT APLN atau sebesar 1,80.

Pada tahun 2015 nilai rata-rata DER mengalami kenaikan yang dari tahun sebelumnya (2014) yaitu menjadi sebesar 1,05. Nilai DER terendah ditahun 2015 yaitu ada pada PT MKPI yaitu sebesar 0,21. Sedangkan, PT ASRI memiliki nilai DER tertinggi yaitu sebesar 1,83. Pada tahun berikutnya tahun 2016 rata-rata DER sebesar 1,07 atau naik . sedangkan untuk nilai terendah DER ada pada PT DUTI 0,24, Juga DER tertinggi masih ada di PT ASRI atau sebesar 1,81.

Pada tahun 2017 nilai rata-rata DER mengalami penurunan menjadi 1,59 Di tahun 2017 nilai DER terendah masih dimiliki PT DUTI sebesar 0,27. Dan nilai DER tertinggi sebesar 1,59 dimiliki PT SMRA.

Dari data diatas terjadi fluktuasi pada nilai maksimal (tertinggi) *Debt to Equity Ratio (DER)* dimana pada tahun 2013 nilai tertinggi sebesar 1,02410. Selanjutnya mengalami kenaikan ditahun 2014 yaitu menjadi 1,02410. Dan ditahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 1,02682. Tahun 2016 DER mengalami penurunan menjadi 1,02610. Dan ditahun 2017 DER mengalami penurunan menjadi 1,01762. Jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, maka peneliti menduga ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan

sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan, yang berarti jika rasio DER naik maka pajak akan turun. Begitupun sebaliknya.

4.1.2 Data *Scaled Earning Changes* (SEC) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Property & Real Estate* Periode 2013-2017.

Scaled Earning Changes (SEC) = X2, merupakan rasio Manajemen Laba dengan metode pendekatan distribusi laba berdasarkan *scaled earning changes*. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah laba yang didapatkan perusahaan dalam menghasilkan dalam periode tersebut. Pengukuran persentase laba seperti dinyatakan berikut: (Sumber: Sulistyono, 2008).

$$SEC = \frac{Net\ Income - Net\ Income\ (t-1)}{MVE\ (t-1)}$$

Keterangan :

Net Income : laba perusahaan pada tahun t

Net Income t-1 : laba perusahaan pada tahun t-1

MVE = jumlah saham yang beredar (t-1) X harga saham (t-1)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan dilakukan perhitungan *scaled earning changes* (SEC) pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* periode 2013-2017, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 9
scale earning changes (SEC)
Perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* Periode 2013-2017

No.	KODE EMITEN	SEC				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APLN	0,0433	0,0262	0,0648	-0,0863	0,4599
2	ASRI	-0,1661	0,1462	-0,2507	-0,0885	0,4452
3	CTRA	0,1487	0,0994	-0,0143	-0,1477	-0,0327
4	DUTI	0,1551	-0,0626	-0,0302	0,1834	-0,2075
5	GPRA	0,1255	-0,0356	-0,0483	-0,0646	-0,0241
6	LPKR	0,1168	0,6705	-0,9168	0,0880	-0,1613
7	MDLN	1,4336	-0,5709	0,0546	-0,1217	0,1352
8	MKPI	0,0265	0,7625	4,7644	3,2666	-0,0604
9	PWON	0,0003	0,0012	-0,0009	0,0003	0,0002
10	SMRA	0,1403	0,3615	-0,3835	-0,3181	-0,0503
	MEAN	1,4336	0,1398	0,3238	0,2711	0,0503
	MIN	-0,1661	-0,5709	-0,9168	-0,3181	-0,2075
	MAX	1,4336	0,7625	4,7644	3,2666	0,4599

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2018).

Berdasarkan tabel 9, nilai rata-rata *scaled earning changes* (SEC) pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,4336. PT ASRI menjadi perusahaan yang memiliki nilai SEC terendah yaitu sebesar -0,1661 sedangkan nilai tertinggi dimiliki PT MDLN yaitu

sebesar 1,4336. Pada tahun 2014 nilai rata-rata SEC mengalami penurunan menjadi 1,1398. Nilai SEC terendah masih dimiliki PT MDLN sebesar -0,5709 dan nilai tertinggi ada pada PT MKPI yaitu sebesar 0,7625.

Pada tahun 2015 nilai rata-rata SEC mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,3238 Nilai SEC terendah yaitu PT LPKR sebesar -0,9168 sedangkan PT MKPI memiliki nilai SEC tertinggi yaitu sebesar 4,7644 lalu mengalami penurunan ditahun 2016 yaitu menjadi sebesar 0,0503 Nilai SEC terendah yaitu ada pada PT SMRA yaitu sebesar -0,3181. Sedangkan, PT MKPI memiliki nilai SEC tertinggi yaitu sebesar 3,2666. Pada tahun berikutnya tahun 2017 nilai SEC mengalami penurunan menjadi 0,0503, nilai SEC terendah adalah PT DUTI yaitu sebesar -0,2075 Dan nilai sec tertinggi dimiliki oleh PT ASRI yaitu sebesar 0,4452.

Dari nilai SEC diatas pada 10 perusahaan yaitu , APLN, ASRI, CTRA, DUTI, GPRA, LPKR, MDLN, MKPI, PWON, SMRA, memiliki nilai rata-rata yang stabil atau tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan.

4.1.3 Data Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2013-2017.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak Menurut Chairil Anwar Pohan (2013). "Pajak penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

$$CTE = \text{Laba Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh Badan}$$

Keterangan : CTE (*Current Tax Expense*) : Beban Pajak kini.

Tabel 10
Pajak penghasilan badan pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2017.

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini	
1	APLN	2013	Rp	294.293.879.750
		2014	Rp	307.424.323.250
		2015	Rp	284.730.236.250
		2016	Rp	240.233.477.750
		2017	Rp	474.123.102.500
2	ASRI	2013	Rp	270.443.957.250
		2014	Rp	346.441.663.500
		2015	Rp	189.739.323.500
		2016	Rp	147.838.352.250
		2017	Rp	361.166.107.750
3	CTRA	2013	Rp	427.372.946.296,25

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini
		2014	Rp 460.787.263.281,75
		2015	Rp 471.271.042.593,75
		2016	Rp 298.623.250.000,00
		2017	Rp 264.497.500.000,00
4	DUTI	2013	Rp 213.541.988.511,50
		2014	Rp 175.005.690.857,25
		2015	Rp 167.737.374.186,75
		2016	Rp 211.093.770.439,00
		2017	Rp 163.253.068.307,25
5	GPRA	2013	Rp 32.629.299.024,25
		2014	Rp 23.329.945.747,50
		2015	Rp 18.457.778.352,50
		2016	Rp 11.832.800.630,75
		2017	Rp 9.490.065.189,75
6	LPKR	2013	Rp 481.207.556.745,00
		2014	Rp 580.989.804.051,25
		2015	Rp 321.207.462.785,00
		2016	Rp 389.436.750.000,00
		2017	Rp 291.782.250.000,00
7	MDLN	2013	Rp 637.149.414.392,75
		2014	Rp 178.552.653.938,25
		2015	Rp 240.027.300.055,75
		2016	Rp 137.642.313.362,00
		2017	Rp 169.197.840.576,25
8	MKPI	2013	Rp 116.121.068.972,00
		2014	Rp 109.488.798.182,50
		2015	Rp 222.564.956.512,75
		2016	Rp 299.949.967.280,00
		2017	Rp 298.432.551.556,75
9	PWON	2013	Rp 332.797.929.000,00
		2014	Rp 652.308.320.000,00
		2015	Rp 356.285.502.250,00
		2016	Rp 432.940.920.000,00
		2017	Rp 517.922.942.750,00
10	SMRA	2013	Rp 329.856.335.250,00
		2014	Rp 404.369.889.000,00
		2015	Rp 266.019.984.750,00
		2016	Rp 219.376.249.250,00
		2017	Rp 199.737.023.000,00

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2019).

Berdasarkan tabel 10 di atas pada 10 perusahaan yaitu, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), dan PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), PT Perdana Gapura Prima Tbk (GPRA), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Modernland Realty Tbk (MDLN), PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI), Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Sumarecon Agung Tbk (SMRA), selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Menunjukkan pada tahun 2013-2017 perusahaan yang jumlah pajak penghasilan badan paling besar adalah PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Sedangkan jumlah pajak penghasilan badan terkecil yaitu pada PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Transformasi Data

Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Pada penelitian ini menggunakan transformasi data jenis logaritma. Transformasi pada penelitian ini bertujuan untuk memenuhi uji asumsi klasik pada penelitian ini. Transformasi logaritma dilakukan dengan cara menglogaritmakan variabel struktur modal dan manajemen laba sebagai variabel independent dan variabel pajak penghasilan badan sebagai variabel dependent.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3. Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut : Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $0,05 < \text{nilai signifikan}$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Pengujian normal probability plot menurut Ghozali (2016), yaitu sebagai berikut: Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal

Hasil pengujian normalitas data residual dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorof-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,20602735
Most Extreme Differences	Absolute	,190
	Positive	,146
	Negative	-,190
Test Statistic		,190
Asymp. Sig. (2-tailed)		,106 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

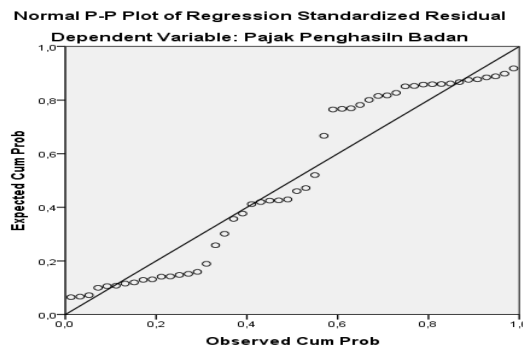
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari table 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) nya sebesar 0.106 atau nilai lebih besar dari 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa data pada penilaian ini berdistribusi normal.



(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Gambar 4

Hasil Pengujian normal probability plot

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa grafik normalitas plot telah memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar di sekitar garis diagonal.

4. Uji Multikolinearitas

Menurut Duwi Priyatno (2012) multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (R^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai VIF > 10 atau jika nilai tolerance < 0,10 maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
- Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance > 0,10 maka tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 12

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Struktur Modal	,998	1,002
Manajemen Laba	,998	1,002

a. Dependent Variable: Pajak Penghasiln Badan

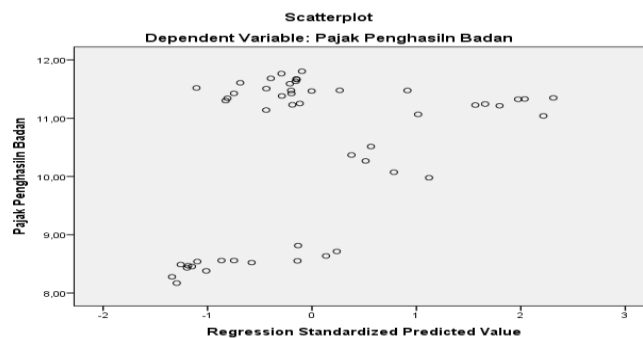
(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* berada $> 0,1$ yaitu ,998 dan nilai *VIF* < 10 yaitu 1,002 yang berarti tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas dalam model regresi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala korelasi antar-variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel dependen melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat kepercayaan 5%. Sementara itu diagram *scatterplot* dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali,2016):

- c. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- d. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pajak Penghasilan Badan terutang berdasarkan masukan variabel struktur modal dengan proksi *Debt to Equity Ratio*(DER) dan Manajemen Laba dengan proksi *Scaled Earning Changes* (SEC).

Tabel 13
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Rank Spearman
Correlations

			Struktur Modal	Manajemen Laba	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Struktur Modal	Correlation	1,000	-,039	-,006	
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)		,787	,970	
			N	50	50	50
	Manajemen Laba	Correlation	-,039	1,000	,012	
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	,787		,933	
			N	50	50	50
	Unstandardized Residual	Correlation	-,006	,012	1,000	
Coefficient						
Sig. (2-tailed)		,970	,933			
		N	50	50	50	

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari tabel 13 Hasil Rank Spearman di atas diketahui nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) variabel Struktur Modal dengan proksi *Debt to Equity* (DER) sebesar 0,970 dan variabel Manajemen Laba dengan proksi *Scaled Earning Changes* (SEC) sebesar 0,933. Karena nilai kedua variabel independen (X) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heterokedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilakukan.

6. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik menyaratkan tidak terjadi autokorelasi. Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan (error) salah satu data pada periode lainnya. Run Test merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). menurut Ghazali (2016) dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Run Test* adalah:

- 6) Jika nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
- 7) Jika nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 14
 Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,17022
Cases < Test Value	25
Cases >= Test Value	25
Total Cases	50
Number of Runs	10
Z	-4,572
Asymp. Sig. (2-tailed)	,105

a. Median

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Berdasarkan tabel 14 diketahui nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak terselesaikan dengan *Durbin Watson* dapat teratasi melalui uji *Run test* sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4.2.3. Uji Hipotesis

- Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)
 Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :
 - a. Jika nilai t_{hasil} perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
 - b. Jika nilai t_{hasil} perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
 - c. $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka Struktur Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 - d. $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka Struktur Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 - e. $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka Manajemen Laba secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 - f. $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka Manajemen Laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Tabel 15
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35,213	7,739		4,550	,000
Struktur Modal	-24,860	7,758	-,424	-3,204	,002
Manajemen Laba	,897	8,895	,013	,101	,092

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Berdasarkan tabel 15 di atas, hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t), yaitu sebagai berikut :

5. Struktur Modal (X_1) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).
Variabel Struktur Modal memiliki t_{hitung} sebesar -3,204 dan nilai t_{tabel} sebesar 3,161 berada dalam taraf signifikan 0,002 yang berarti $<$ taraf signifikan 0,05 (5%), dengan demikian tampak bahwa $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, yaitu $(-3,204 > 3,161)$ yang berarti H_a diterima, dan H_o diterima. Artinya secara parsial Variabel Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan.
 6. Manajemen Laba (X_2) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).
Variabel Manajemen Laba memiliki nilai t_{hitung} sebesar 101 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,67779 berada dalam taraf signifikan 0,092 yang berarti $>$ taraf signifikan 0,05 (5%), dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $(0,101 < 2,67779)$ yang berarti H_a ditolak, dan H_o ditolak. Artinya secara parsial Variabel Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan.
- Uji Simultan (Uji Statistik F)
Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :
 - b. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
 - c. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
 - d. $H_{0.4}$ jika Sig. $<$ 0,05 maka Struktur Modal, dan Manajemen Laba secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 - e. $H_{1.4}$ jika Sig. $>$ 0,05 maka Struktur Modal dan Manajemen Laba secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Tabel 16
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	15,658	2	7,829	5,163	,009 ^b
Residual	71,271	47	1,516		
Total	86,929	49			

a. Dependent Variable: Pajak Penghasiln Badan

b. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Struktur Modal

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) yang disajikan pada tabel 16 diatas, di peroleh hasil F_{hitung} sebesar 5,163 dengan nilai signifikansi 0,009. Untuk F_{tabel} diperoleh hasil sebesar 3,19 dengan taraf signifikansi positif yang disajikan pada tabel diatas sebesar 0,009 yang berarti $< 0,05$ (5%) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,163 > 3,19$ maka hipotesis diterima, karena nilai F_{hitung} yaitu sebesar 5,163. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal dan Manajemen Laba secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan.

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. (Ghozali, 2016) Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1

- Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763 ^a	,533	,145	1,23142

a. Predictors: (Constant), LDAR, DER

b. Dependent Variable: data PPh

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari Tabel 17 di atas, menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan ($adjusted R square$) dan ukuran prediksi kesalahan ($Std. Error of the Estimate$), antara lain :

- e. Nilai korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,763 artinya korelasi atau hubungan antara variabel truktur Modal dan Manajemen Laba terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang sebesar 0,763 atau 76,3%. Nilai R yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (erat). Sehingga, korelasi antara variabel Struktur Modal dan terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Manajemen Laba sebesar 0,763 berarti terjadi hubungan yang kuat (erat) karena mendekati nilai 1.
- f. Nilai koefisien determinasi *R square* (R^2) adalah sebesar 0,582 menunjukkan bahwa variasi dari Pajak Penghasilan Badan terutang dapat dijelaskan oleh Struktur Modal dan Manajemen Laba sebesar 0,582 atau 58,2% sedangkan sisanya yaitu sebesar 41,8 atau 41,8% dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
- g. *Adjusted R square* adalah *R square* yang telah disesuaikan. Nilai *adjusted R square* dalam penelitian ini adalah 0,533 atau 53,3% ini menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- h. *Standard Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai sebesar 1,23142 menunjukkan bahwa kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Pajak Penghasilan Badan Terutang.

4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu dengan melihat Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap variabel dependen, yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Tabel 18
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35,213	7,739		4,550	,000
Struktur Modal	-24,860	7,758	-,424	-3,204	,002
Manajemen Laba	,897	8,895	,013	,101	,092

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2019).

Dari Tabel 18 di atas dapat diketahui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 35,213 - 24,860 (\text{Struktur Modal}) + ,897 (\text{Manajemen Laba})$$

Keterangan:

Y = Pajak Penghasilan Badan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi model

X₁ = Struktur Modal

X₂ = Manajemen Laba

e = *error term model* (variabel residual).

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

4. Nilai Konstanta (α) sebesar 35,213 artinya apabila (X₁) Struktur Modal dan Manajemen Laba (X₂) nilainya adalah (0) tidak berubah. Maka nilai
5. Variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan badan terutang (Y) nilainya positif yaitu sebesar 35,213.

Nilai koefisien regresi variabe Struktur Modal (b1) bernilai negatif yaitu -24,860. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Struktur Modal sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka pajak penghasilan badan terutang juga akan menurun sebesar -24,860 Koefisien Struktur Modal bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa Struktur Modal berhubungan negatif dengan pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari koefisien Struktur Modal tersebut maka, dapat di simpulkan bahwa jika Struktur Modal bernilai negatif maka pajak penghasilan badan terutang pun akan turun.

Nilai koefisien regresi varibel Manajemen Laba (b2) bernilai negatif yaitu ,897. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Manajemen Laba sebesar 1 satuan, maka pajak penghasilan badan terutang juga akan menurun sebesar ,897. Koefisien Manajemen Laba bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba berhubungan positif dengan pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor *property* dan *real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari koefisien Manajemen Laba tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika Manajemen Laba bernilai positif maka pajak penghasilan badan terutang pun akan naik.

6.3. Pembahasan

Tabel 19
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	DER → pph badan terutang	H1 = Struktur modal berpengaruh terhadap pph Badan	Struktur modal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.	H1= diterima
2	SEC → pph badan terutang	PPh Badan	Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan	H2 = ditolak
3	DER & SEC → pph badan terutang	H2 = Struktur modal dan Manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh Badan	Struktur modal Dan manajemen laba Secara bersama-sama berpengaruh terhadap pph badan	H3 = diterima

4.3.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017

Pada hasil pengujian Struktur Modal (X_1) terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -3,204 dan t_{tabel} sebesar 3,161 maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($-3,204 > 3,161$) dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ($0,002 < 0,05$), sehingga hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

4.3.2 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017

Pada hasil pengujian manajemen laba (X_1) terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,101 dan t_{tabel} sebesar 2,67779 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($0,101 < 2,67779$) dengan tingkat signifikan sebesar 0,092 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,097 > 0,05$), sehingga hipotesis 2 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

4.3.3 Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI

Berdasarkan hasil uji (*f test*) terlihat bahwa nilai f_{hitung} sebesar 5,163 dan f_{tabel} sebesar 3,19 maka ($f_{hitung} < f_{tabel}$) ($5,163 > 3,19$) dengan tingkat signifikan sebesar 0,009 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau ($0,009 < 0,05$), sehingga hipotesis 3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal dan manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. Struktur Modal (X_1) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).

Berdasarkan hasil uji secara statistik yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa variabel struktur modal (X_1) secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel dependen pajak penghasilan badan terutang. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan maka didapatkan perbandingan antara variabel struktur modal dengan pajak penghasilan badan terutang sebagai berikut:

Tabel 20
Rata-rata struktur modal dan pajak penghasilan badan terutang

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Struktur modal	1.13	1.03	1.05	1.07	0.96
PPHB	223.776.00jt	193.383.00jt	170.811.00jt	156.877.00jt	139.774.00jt

(Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis, Tahun 2019)

Dari hasil perbandingan data pada tabel diatas maka dapat dinyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan yang terjadi pada struktur modal (DER) dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*. Berdasarkan data pengujian secara statistik maupun data yang diperoleh dari perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. DER timbul akibat modal yang di dapatkan dari pihak ketiga atau bank yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. DER yang timbul pada suatu periode akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil, sehingga pajak penghasilan badan terutang menjadi kecil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya struktur modal dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Azhari (2015) menyebutkan bahwa rasio *debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Namun hasil penelitian ini sama dengan penelitian Simamora dan Ryadi (2015) yang menemukan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang, Endah Nilam (2010) yang menemukan bahwa rasio *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan, penelitian Abdullah Khoirul Anwar (2018) yang menemukan bahwa rasio *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, Yulianti (2014) yang menemukan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang di teliti berbeda dalam rentang waktu yang berbeda pula.

4.4.2. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Berdasarkan hasil uji secara statistik yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa manajemen laba (X2) secara parsial (uji t) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pajak penghasilan badan terutang. Implikasi hasil temuan penelitian ini adalah bahwa ketika perusahaan melakukan peningkatan atau menurunkan Laba perusahaan, bukan untuk menurunkan atau menaikkan beban Pajak Penghasilan Badan. Tetapi, kemungkinan perusahaan menaikkan dan menurunkan Laba perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan elektabilitas perusahaan.

Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh perusahaan maka didapatkan perbandingan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba sebagai berikut:

Tabel 21
Rata-rata Manajemen laba dan pajak penghasilan badan terutang

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Manajemen laba	0.20	0.14	.32	0.27	0.05
PPHB	257,124.00jt	258,548.00jt	206,404.00jt	200,128.00jt	191,514.00jt

(Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis, Tahun 2019)

Dari tabel data diatas dapat terlihat bahwa selama periode pengamatan hanya pada tahun 2014 manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pada tahun 2015 manajemen laba tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 namun beban pajak penghasilan badan terutang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun-tahun lainnya manajemen laba cenderung menurunkan pajak penghasilan badan pada saat kondisi manajemen laba turun. Hal tersebut mengindikasikan adanya ke tidak sesuaian dengan teori pada penelitian ini, Berdasarkan hal tersebut maka, terdapat kemungkinan kenaikan dan penurunan pajak penghasilan badan tidak di sebabkan oleh manajemen laba pada perusahaan *property* dan *real estate* sehingga tidak terjadinya pengaruh positif ataupun negatif antara manajemen laba dengan pajak penghasilan badan.

Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Abdullah Khoiril Anwar (2018) yang menemukan bahwa Manajemen Laba berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap PPh Badan Terutang, hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang di teliti berbeda dalam rentang waktu yang berbeda pula. Namun serupa dengan penelitian Andi Azhari (2015) yang menemukan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.

Implikasi hasil temuan penelitian ini adalah bahwa ketika perusahaan melakukan peningkatan maupun menurunkan Laba perusahaan, bukan untuk memainkan beban Pajak Penghasilan Badan. Tetapi, kemungkinan perusahaan menaikkan atau menurunkan laba perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan elektabilitas perusahaan.

4.4.3 Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Berdasarkan hasil uji (*f test*) pada tabel 19 dan 20. diatas bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Struktur Modal dan Manajemen Laba bahwa secara simultan memiliki pengaruh signifikan dengan memiliki hubungan positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan. Dengan demikian karena nilai F_{hitung} koefisien positif, dapat dikatakan semakin tinggi rasio DER dan Manajemen Laba maka Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan perusahaan naik, jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.17 tahun 2000. Dapat disimpulkan DER dan Manajemen Laba secara bersama-sama tidak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Andi Azhari (2015), Abdullah Khoiril Anwar (2018). yang menemukan bahwa secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh signifikan positif antara pajak penghasilan badan.

Hasil penelitian ini, peneliti mengindikasikan bahwa ketika perusahaan menaikkan Struktur Modal dan Manajemen Laba tidak untuk menurunkan Pajak Penghasilan Badan, tetapi kemungkinan untuk menaikkan laba perusahaan, nilai perusahaan, nilai perusahaan dan elektabilitas perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur modal yang di proksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependent pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan Bunga hutang yang timbul karena adanya modal hutang yang di peroleh dari pihak ke tiga akan menjadi pengurang bagi laba perusahaan sehingga beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil, Jadi jika struktur modal suatu perusahaan meningkat maka secara otomatis pajak penghasilan badan yang akan di bayarkan perusahaan akan menjadi lebih kecil.
2. Manajemen laba yang di proksikan dengan *scaled earning changes* (SEC) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependent pajak penghasilan badan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) periode 2013-2017. Hal ini mengindikasikan bahwa naik turunnya manajemen laba pada perusahaan *property* dan *real estate* yang diteliti tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan bisa jadi di gunakan untuk kepentingan lain yang digunakan untuk menaikkan kinerja perusahaan, nilai perusahaan dan elektabilitas perusahaan.
3. Struktur modal dan manajemen laba secara simultan mempengaruhi pajak penghasilan badan perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia(BEI) periode 2013-2017. Karena struktur modal merupakan bagian dari manajemen laba sehingga 2 variabel tersebut diuji secara bersama-sama hasilnya akan berpengaruh .

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, maka penulis memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Dalam hal penentuan kebijakan permodalan perusahaan harus memperhatikan keadaan ekonomi perusahaan. Meskipun ada keuntungan pajak yang ditimbulkan dari penggunaan hutang, namun rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki rasio

hutang yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka penggunaan hutang justru dapat meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penggunaan hutang dalam komposisi struktur modal dapat disikapi dengan bijak agar tidak hanya mementingkan kepada tujuan dan kepentingan jangka pendek saja seperti motif pajak misalnya, tetapi penggunaan hutang juga harus didasarkan kepada konsep kelangsungan usaha dalam jangka panjang, agar dapat meminimalisir resiko kebangkrutan dan tetap menjaga nilai positif dimata investor dalam hal pembagian dividen saham. Seperti halnya dengan kebijakan hutang dalam struktur modal yang harus disikapi secara cermat, penggunaan teknik pengelolaan laba juga harus dilakukan berdasarkan pertimbangan tepat dan tentunya dilakukan dengan wajar tanpa harus melanggar peraturan akuntansi keuangan, peraturan perpajakan yang berlaku dan tentunya tetap menjalankan prinsip etika bisnis yang bermoral.

2. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, pemerintah dapat mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan- kebijakan perpajakan yang nantinya akan mendorong peningkatan investasi diindonesia sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang digunakan dari penerimaan pajak tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*, penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pada sektor atau sub sektor perusahaan yang lain di luar sub sektor *property* dan *real estate*, agar diperoleh data yang lebih baik dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya memakai *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam mengukur Struktur modal perusahaan, karena struktur modal tidak hanya bisa diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) saja tetapi juga bisa diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Long Term Debt to Asset Ratio*, dan variabel manajemen saja bisa juga di tambahkan rasio keuangan lainnya.

4. Bagi Investor

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan karena nilai rasio hutang yang tinggi akan mampu menurunkan jumlah pajak yang akan dibayarkan sehingga laba yang di dapatkan investor akan semakin besar, namun rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran yang tinggi pula, yang akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi investor dalam mempertimbangkan penanaman modal dalam suatu perusahaan, agar investor dapat mengetahui prospek perusahaan yang dapat menguntungkan bagi pengembalian sahamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Khoirul Anwar (2018), *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang* (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017). Program skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor.
- Andi Azhari (2015), *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang* (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2014). Program Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Agnes Sawir (2003), *Analisis Kinerja dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ahmad Radoni dan Herni Ali (2010), *Manajemen Keuangan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bambang Ryanto (2008), *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE, Yogyakarta.
- Brigham dan Houston F Joel (2001), *Manajemen Keuangan*. Erlangga, Jakarta.
- Diaz Priantara (2012), *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ke-2, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Fred Weston J dan Thomas E Compeland (2010), *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi Ke 1. Binarupa, Tangerang.
- Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnan Suad (2000), *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. BPFE, Yogyakarta.
- Ilyas Wirawan dan Richard Burton (2007), *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Irham Fahmi (2013), *Pengantar Manajemen Teori dan Soal Jawab*. Alfabeta, Bandung.
- Lukas Setia Atmaja (2002), *Manajemen Keuangan*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2009), *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2015), *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Mulyadi (2006), *Manajemen Keuangan. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bayumedia, Malang.
- Endah Nilam Ramdani (2010), *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Patar Simamora dan Muhamad Resa Mahardika Ryadi (2015), *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Volume 1 No2, Universitas Pakuan, Bogor.

Warsono (2003), *Manajemen Keuangan*. UMM Press, Malang.

Yulianti (2014), *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013*. Program S1 Universitas Pakuan, Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan *Property Dan Real Estate*

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Tanggal Listing di BEI
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	11/10/2010
2	PT Alam Sutra Realty Tbk.	ASRI	18/12/2007
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	28/03/1994
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	2/11/1994
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	10/10/2007
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	28/06/1996
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	18/01/1993
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	10/07/2009
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	19/10/1989
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	7/05/1990

Lampiran 2 Struktur Modal (DER)Perusahaan *Property Dan Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek IndonesiaPeriode 2013-2017

**Debt Equity Ratio Perusahaan *Property Dan Real Estate*
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun 2013					
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Total liabilitas	Total equitas	DER
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	12,467,225.00	7,212,683.00	1,73
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	9,096,297.00	5,331,784.00	1,71
3	PT Ciputra Depeloment Tbk.	CTRA	10,349,358.00	9,765,513.00	1,06
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	1,428,544.00	6,045,051.00	0,24
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	531,728.00	8,009,178.00	0,66
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	17,122,789.00	14,177,573.00	1,21
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	4,972,112.00	4,675,700.00	1,06
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	920,106.00	1,918,607.00	0,48
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	5,195,736.00	4,102,508.00	1,27
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	9,001,470.00	4,657,666.00	1,93

Tahun 2014					
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Total Liabilitas	Total Equity	DER
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	15,223,268.00	8,462,884.00	1,80
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	10,553.00	6,371,193.00	1,66
3	PT Ciputra Depeloment Tbk.	CTRA	11,886,277.00	11,652,437.00	1,02
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	1,879,854.00	6,250,932.00	0,30
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	637,036.00	880,539.00	0,72
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	20,235,547.00	17,620,829.00	1,15
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	5,036,365.00	5,322,781.00	0,95
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	475,405.00	2,146,863.00	0,22
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	8,494,161.00	8,276,581.00	1,03
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	9,456,215.00	6,416,455.00	1,47

Tahun 2015					
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Total Liabilitas	Total Equity	DER
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	15,486,506.00	9,072,668.00	1,71
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	12,107,460.00	6,602,409.00	1,83
3	PT Ciputra Depeloment Tbk.	CTRA	13,208,497.00	13,050,221.00	1,01
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	2,183,853.00	6,831,058.00	0,32
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	626,943.00	947,230.00	0,66
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	22,409,793.00	18,916,764.00	1,18
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	6,785,593.00	6,057,456.00	1,12
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	592,733.00	2,829,195.00	0,12
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	9,323,066.00	9,455,055.00	0,99
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	11,228,512.00	7,529,749.00	1,49

Tahun 2016					
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Total Liabilitas	Total Equity	DER
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	15,741,190.00	9,970,762.00	1,58
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	12,998,285.00	7,187,845.00	1,83
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	14,774,323.00	14,297,927.00	1,03
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	1,899,304.00	7,792,913.00	0,24
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	559,139.00	1,010,179.00	0,55
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	23,528,544.00	22,075,139.00	1,07
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	7,944,774.00	6,595,334.00	1,20
8	PT Metropolitan ketjana Tbk..	MKPI	2,897,296.00	3,714,904.00	0,78
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	9,654,447.00	11,019,693.00	0,88
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	12,644,764.00	8,165,555.00	1,55

Tahun 2017					
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Total Liabilitas	Total Equity	DER
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	17,293,138.00	11,496,977.00	1,50
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	12,155,738.,00	8,572,691.00	1,42
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	16,255,398.00	15,456,765.00	1,05
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	2,240,819.00	8,334,861.00	0,27
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	466,150.00	1.033.311.672.197	0,45
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	26,911,822.00	29,860,294.00	0,90
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	7,522,211.00	7,077,457.00	1,06
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	2,276,438.00	4.551.607.678.081	0,50
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	10,567,227.00	12,791,490.00	0,83
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	13,308,969.00	8,353,742.00	1,59

Lampiran 3 Manajemen Laba (SEC)Perusahaan Property Dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

**Manajemen Laba Pada Perusahaan *Property Dan Real Estate*
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun 2013						
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Niit	NIit-1	MVEt-1	ML
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	930,240.00	841,290.00	2,050,090.00	0,0434
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	889,576.00	1,216,091.00	196,4941.00	-0.1662
3	PT Ciputra Depeloment Tbk.	CTRA	1,413,388.00	849,382.00	3,791,454.00	0.1488
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	756,858.00	613,327.00	925,000.00	0.1552
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	106,511.00	56,281.00	400,276.00	0.1255
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	1,592,491.00	1,322,847.00	2,307,768.00	0.1168
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	2,451,686.00	260,474.00	1,528,422.00	1.4336
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	365,563.00	363,050.00	94,819.00	0.0265
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	1,136,547.00	766,495.00	1,203,990.00	0.0003
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	1,095,888.00	792,085.00	2,164,017.00	0.1404

Tahun 2014						
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Niit	NIit-1	MVEt-1	ML
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	983,875.00	930,240.00	2,050,090.00	0.0262
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	1,176,955.00	889,576.00	1,964,941.00	0.1463
3	PT Ciputra Depeloment Tbk.	CTRA	1,794,593.00	1,413,388.00	3,832,664.00	0.0995
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	698,952.00	756,858.00	925,000.00	0.0626
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	92,228.00	106,511.00	400,276.00	0.0357
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	3,139,951.00	1,592,491.00	2,307,768.00	0.6705
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	706,295.00	2,451,686.00	3,056,845.00	0.5710
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	437,863.00	365,563.00	94,819.00	0.7625
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	2,598,832.00	1,136,546.00	1,203,990.00	0.0012
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	1,617,479.00	1,095,888.00	1,442,678.00	0.3615

Tahun 2015						
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Niit	NIit-1	MVEt-1	ML
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	1,116,763.00	983,875.00	2,050,090.00	0.0648
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	684,288.00	1,176,955.00	1,964,941.00	-0.2597
3	PT Ciputra Depeloment Tbk.	CTRA	1.740.300.162.426	1,794,593.00	3,832,664.00	-0.0143
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	670.949.496.747	698,952.00	925,000.00	-0.0303
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	72.893.324.167	92,228.00	400,276.00	-0.0483
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	1.024.120.634.260	3,139,951.00	2,307,768.00	-0.9168
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	873.420.195.958	706,295.00	3,056,845.00	0.0547
8	PT Metropolitan ketjana Tbk.	MKPI	889.628.065.732	437,863.00	94,819.00	4.7645
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	1.400.554.118	2.598.832.017	1,203,990.00	-0.001
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	1.064.079.939.000	1.617.479.556.000	1,442,678.00	-0.3836

Tahun 2016						
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Niit	Niit-1	MVEt-1	ML
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	939,737.00	1,116,763.00	2,050,090.00	-0.0864
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	510,243.00	684,288.00	1,964,941.00	-0.0886
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	1.170.706.000.000	1.740.300.162.426	3,832,664.00	-0.1477
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	840,650.00	670.949.496.747	925,000.00	0.1835
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	46,995.00	72.893.324.167	400,276.00	-0.0647
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	1.227.374.000.000	1.024.120.634.260	2,307,768.00	0.088
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	501.349.673.188	873.420.195.958	3,056,845.00	-0.1217
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	1.199.373.747.588	889.628.065.732	94,819.00	3.2667
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	1.780.259.981	1.400.554.118	1,203,990.00	0.0003
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	605.050.858.000	1.064.079.939.000	1,442,678.00	-0.3182

Tahun 2017						
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Niit	Niit-1	MVEt-1	ML
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	1,882,581.00	939,737.00	2,050,090.00	0.4599
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	1,385,189.00	510,243.00	1,964,941.00	0.4453
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	1.018.529.000.000	1.170.706.000.000	3,832,664.00	-0.0328
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	648.646.197.979	840.650.624.016	925,000.00	-0.2076
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	37.316.086.438	46.995.769.773	400,276.00	-0.0242
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	854.984.000.000	1.227.374.000.000	2,307,768.00	-0.1613
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	914.773.608.046	501.349.673.188	3,056,845.00	0.1352
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	1.193.639.823.893	1.199.373.747.588	94,819.00	-0.0605
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	2.024.627.040	1.780.259.981	1,203,990.00	0.0002
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	532.437.613.000	605.050.858.000	1,442,678.00	-0.0503

Lampiran 4. Market Value of Equity (MVE) Perusahaan Property Dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

Market Value of Equity Tahun Sebelumnya Perusahaan Property Dan Real Estate

(dinyatakan dalam rupiah)

Tahun 2012					
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Harga Saham	Saham Yang Beredar	MVE
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	100.00	20,500,900,000	2,050,090,000,000.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	100.00	19,649,411,890	1,964,941,189,000.00
3	PT Ciputra Develoement Tbk.	CTRA	250.00	5,055,272,000	3,791,454,000,000.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	500.00	1,850,000,000	925,000,000,000.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	152.00	2,633,399,048	400,276,655,366.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	100.00	23,077,689,619	2,307,768,961,900.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	250.00	6,113,691,376	1,528,422,844,000.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	100.00	948,194,000	94,819,400,000.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	25.00	48159602400	1,203,990,060,000.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	200.00	7,213,390,840	1,442,678,168,000.00
		SMRA	100.00	14,426,781,680	1,442,678,168,000.00

Tahun 2013					
No.	Nama Bank	Kode Saham	Harga Saham	Saham Yang Beredar	MVE
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	100.00	20,500,900,000	2,050,090,000,000.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	100.00	19,649,411,890	1,964,941,189,000.00
3	PT Ciputra Develoement Tbk.	CTRA	750.00	5,110,219,867	3,791,454,000,000.00
		CTRA	250.00	164,843,600	41,210,900,000.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	500.00	1,850,000,000	925,000,000,000.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	152.00	2,633,399,048	400,276,655,366.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	100.00	23,077,689,619	2,307,768,961,900.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	250.00	6,113,691,376	1,528,422,844,000.00
		MDLN	500.00	3,056,845,688	1,528,422,844,000.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	100.00	948,194,000	94,819,400,000.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	25.00	48159602400	1,203,990,060,000.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	100.00	14,426,781,680	1,442,678,168,000.00

Tahun 2014					
No.	Nama Bank	Kode Saham	Harga Saham	Saham Yang Beredar	MVE
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	100.00	20,500,900,000	2,050,090,000,000.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	100.00	19,649,411,890	1,964,941,189,000.00
3	PT Ciputra Develoement Tbk.	CTRA	250.00	15,165,815,994	3,791,454,000,000.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	500.00	1,850,000,000	925,000,000,000.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	152.00	2,633,399,048	400,276,655,366.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	100.00	23,077,689,619	2,307,768,961,900.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	250.00	6,113,691,376	1,528,422,844,000.00
			500.00	3,056,845,688	305,684,568,000.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	100.00	948,194,000	94,819,400,000.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	25.00	48159602400	1,203,990,060,000.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	100.00	14,426,781,680	1,442,678,168,000.00

Tahun 2015					
No.	Nama Bank	Kode Saham	Harga Saham	Saham Yang Beredar	MVE
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	100.00	20,500,900,000	2,050,090,000,000.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	100.00	19,649,411,890	1,964,941,189,000.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	750.00	5,314,100.00	3,856,322,800,000.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	500.00	1,850,000,000	925,000,000,000.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	152.00	2,633,399,048	400,276,655,366.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	100.00	23,077,689,619	2,307,768,961,900.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	250.00	6,113,691,376	1,528,422,844,000.00
		MDLN	500.00	3,056,845,688	1,528,422,844,000.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	100.00	948,194,000	94,819,400,000.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	25.00	48159602400	1,203,990,060,000.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	100.00	14,426,781,680	1,442,678,168,000.00

Tahun 2016					
No.	Nama Bank	Kode Saham	Harga Saham	Saham Yang Beredar	MVE
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	100.00	20,500,900,000	2,050,090,000,000.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	100.00	19,649,411,890	1,964,941,189,000.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	250.00	2,541,100.00	3,791,454,000,000.00
		CTRA	250.00	3,394,487,206	848,621,801,500.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	500.00	1,850,000,000	925,000,000,000.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	152.00	2,633,399,048	400,276,655,366.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	100.00	23,077,689,619	2,307,768,961,900.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	250.00	6,113,691,376	1,528,422,844,000.00
		MDLN	500.00	3,056,845,688	1,528,422,844,000.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	100.00	948,194,000	94,819,400,000.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	25.00	48159602400	1,203,990,060,000.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	100.00	14,426,781,680	144,267,816,8000.00

Lampiran 5 PPH Badan Perusaha Property Dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

Beban Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Property Dan Real Estate

Tahun 2013			
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PPH Badan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	294,293.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	270,443.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	427,372.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	213,541.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	32,629.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	481,207.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	637,149.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	116,121.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	332.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	329,856.00

Tahun 2014			
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PPH Badan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	307,424.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	346,441.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	460,787.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	175,005.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	23,329.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	580,989.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	178,552.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	109,488.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	652.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	404,369.00

Tahun 2015			
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PPH Badan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	284,730.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	189,739.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	471,271.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	167,737.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	18,457.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	321,207.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	240,027.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	222,564.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	356.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	266,019.00

Tahun 2016			
No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PPH Badan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	240,233.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	147,838.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	298,623.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	298,623.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	211,093.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	11,832.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	389,436.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	298,432.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	432.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	219,376.00

Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PPH Badan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	474,123.00
2	PT Alam Sutra Reality Tbk.	ASRI	361,166.00
3	PT Ciputra Depelopment Tbk.	CTRA	264,497.00
4	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	183,253.00
5	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA	9,490.00
6	PT Lippo Karawaci Tbk.	LPKR	291,782.00
7	PT Modern Land Reality Tbk.	MDLN	169,197.00
8	PT Metropolitan ketjana Tbk	MKPI	298,432.00
9	PT Pakuwon Jati Tbk.	PWON	517.00
10	PT Summarecon Agung Tbk.	SMRA	199,737.00